Sanjana
Jurnal Perbankan Syariah dan Ekonomi Syariah
e-ISSN : 2723-5289
Vol. 08 No. 01, (Januari: 2026)

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal Dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Lampung Dalam Perspektif Ekonomi Islam Tahun 2014-2024

Widya Anggraini[a], Nurlaili[b], Zulaikah[c]

[a] UIN Raden Intan Lampung, Jl. Letnan Kolonel H Jl. Endro Suratmin, Bandar Lampung, 35131, anggraeniw221@gmail.com
[b] UIN Raden Intan Lampung, Jl. Letnan Kolonel H Jl. Endro Suratmin, Bandar Lampung, 35131, nurlaili@radenintan.ac.id
[c] UIN Raden Intan Lampung, Jl. Letnan Kolonel H Jl. Endro Suratmin, Bandar Lampung, 35131, zulaikah@radenintan.ac.id

Abstrak

Pertumbuhan ekonomi adalah proses meningkatnya kemampuan suatu daerah dalam memproduksi barang dan jasa, yang terlihat dari peningkatan nilai barang dan jasa tersebut seiring berjalannya waktu. Pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu ukuran penting untuk menilai kesuksesan pembangunan karena menggambarkan kemampuan daerah dalam mengelola sumber daya yang ada dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam perspektif ekonomi islam, pertumbubuhan ekonomi tidak hanya diukur dari peningkatan output, tetapi juga dari sejauh mana pertumbuhan tersebut mampu mewujudkan kemaslahatan, keadilan, dan kesejahteraan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Lampung dalam Perspektif Ekonomi Islam. Data yang di gunakan adalah data sekunder yang berasal dari publikasi Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah memengaruhi pertumbuhan ekonomi secara positif dan signifikan, sementara belanja modal juga memengaruhi pertumbuhan ekonomi secara positif, tetapi tidak signifikan. Secara simultan atau Bersama-sama Pendapatan Asli Daerah dan belanja modal berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Lampung.

Kata Kunci: Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal, Pertumbuhan Ekonomi, Ekonomi Islam.

PENDAHULUAN

Pertumbuhan ekonomi menggambarkan peningkatan kapasitas produksi suatu wilayah yang tercermin dari kenaikan output dalam jangka waktu tertentu. Kondisi ini menunjukkan adanya perbaikan aktivitas ekonomi masyarakat serta keberhasilan proses pembangunan yang berlangsung.(Mamuka et all, 2019) Pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah bisa diukur, dan seberapa besar kegiatan ekonomi tersebut mampu memberikan penghasilan tambahan bagi masyarakat dalam jangka waktu tertentu.(Ramla Ilham Darise, 2022). Salah satu cara meningkatkan kemampuan produksi agar bisa meningkatkan hasil yang diukur menggunakan Produk Domestik Bruto (PDB) dan

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dalam suatu wilayah. PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu, atau merupakan jumlah total output perekonomian yang dihasilkan oleh berbagai kegiatan produksi dalam suatu wilayah selama periode tertentu. (Noviasari, 2021).

Berikut dapat kita lihat persentase data pertumbuhan ekonomi di Provinsi Lampung dalam periode 2014-2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Produk Domestik Regional Bruto Atas Harga Konstan (Milyar Rupiah) Provinsi Lampung Tahun 2014-2024

Tahun	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
2014	**180.620,01**
2015	**199.536,92**
2016	**209.793,62**
2017	**220.626,10**
2018	**232.165,99**
2019	**244.378,31**
2020	**240.319,59**
2021	**246.966,49**
2022	**257.534,19**
2023	**269.240,54**
2024	**281.557,20**

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung

Tabel 1 menampilkan data Produk Domestik Regional Bruto **(**PDRB) Atas harga konstan Provinsi Lampung selama periode 2014-2024 yang fluktuatif (berubah-ubah). Pada tahun 2014 mencatat angka sebesar Rp.180.620,01 miliar dan mengalami peningkatan hingga mencapai Rp.244.319,59 miliar pada tahun 2019. Namun, pada tahun 2020 terjadi penurunan menjadi Rp.240.319,59 akibat dampak pandemi COVID-19 yang mengganggu berbagai aktivitas ekonomi. Setelah itu, kondisi ekonomi mulai menunjukkan pemulihan secara bertahap dengan peningkatan PDRB menjadi Rp.246.966,49 pada tahun 2021, naik lagi ke angka Rp.257.534,19 di tahun 2022, dan

mencapai Rp.281.557,20 pada tahun 2024. Dengan data ini, kita bisa melihat bagaimana dinamika ekonomi daerah berlangsung dan bagaimana Pendapatan Asli Daerah dapat mempengaruhi proses pemulihan dan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan dalam jangka Panjang. Sehingga saat ini pemerintah daerah khususnya sangat berusaha dalam pemulihan ekonomi daerah yaitu dengan memaksimalkan pendapatan-pendapatan asli daerah. (Tuwo et al, 2022)

Pendapatan Asli Daerah adalah tanda kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan sendiri, yang menunjukkan sejauh mana daerah bisa membiayai pembangunan dan layanan yang diberikan kepada masyarakat (Rohyana & Abdul Rozak, 2022). Selain itu, Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari pajak dan retribusi daerah mencerminkan dinamika aktivitas ekonomi masyarakat, sehingga peningkatan Pendapatan Asli Daerah berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan (Humaira & Widyawati, 2025). Peningkatan Pendapatan Asli Daerah memperluas kapasitas fiskal daerah yang dapat diarahkan pada alokasi belanja modal, sehingga mendukung perbaikan kualitas pelayanan publik.

Berikut dapat kita lihat data Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Lampung dalam periode 2014-2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Pendapatan Asli Daerah (Milyar Rupiah) Provinsi Lampung Tahun 2014-2024

Tahun	Pendapatan Asli Daerah
2014	**2.274.685.573**
2015	**2.247.342.668**
2016	**2.368.796.251**
2017	**2.750.582.686**
2018	**2.864.235.753**
2019	**3.018.067.291**
2020	**2.842.286.479**
2021	**3.249.614.882**
2022	**3.678.302.294**
2023	**3.766.194.060**
2024	**4.047.411.125**

Sumber: Badan Pusat Statistik Provisi Lampung

Pada Tabel 2 di atas menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Lampung pada tahun 2014 sampai 2024 menunjukkan pertumbuhan yang positif. Penurunan Pendapatan Asli Daerah terdapat pada tahun 2020, jika dilihat Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2019 sebesar Rp. 3.018.067.291 miliar dan pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi Rp. 2.842.286.479 miliar terjadinya penurunan karna akibat adanya dampak pandemi COVID-19.Namun pada tahun 2024 mengalami peningkatan yaitu sebesar Rp. 4.047.411.125 miliar.

Berdasarkan teori pertumbuhan ekonomi, peningkatan Pendapatan Asli Daerah seharusnya berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi, karena semakin besar Pendapatan Asli Daerah, semakin besar pula kemampuan daerah untuk membiayai belanja pembangunan dan pelayanan publik. Dari data pada Tabel 2, terlihat bahwa Pendapatan Asli Daerah Provinsi Lampung mengalami peningkatan dari tahun 2014–2019, kemudian menurun tajam pada tahun 2020 akibat pandemi COVID-19. Penurunan ini juga diikuti dengan turunnya Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada tabel 1 dari Rp.244.378,31 miliar di tahun 2019 menjadi Rp.240.319,59 miliar di tahun 2020. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi riil di Provinsi Lampung sejalan dengan teori, di mana penurunan Pendapatan Asli Daerah menyebabkan menurunnya pertumbuhan ekonomi. Setelah pandemi mereda, Pendapatan Asli Daerah kembali meningkat dari tahun 2021 hingga 2024, dan pertumbuhan ekonomi pun menunjukkan tren pemulihan dari Rp.246.966,49 miliar menjadi Rp.281.557,20.

Pendapatan Asli Daerah mencerminkan kapasitas fiskal pemerintah daerah yang dapat digunakan untuk memperkuat aktivitas pembangunan. Optimalisasi sumber penerimaan ini membuka ruang keterlibatan masyarakat dalam mendorong peningkatan kinerja ekonomi daerah. Pertumbuhan ekonomi daerah yang membaik menciptakan iklim usaha yang lebih kondusif sehingga mendorong masuknya investasi. Kondisi tersebut berimplikasi pada peningkatan kapasitas penerimaan daerah. Selanjutnya, pemerintah dapat mengarahkan sumber pendapatan tersebut untuk memperkuat pembiayaan belanja modal guna mendukung penyediaan layanan publik (Fani Wiraswasta & M. Pudjihardjo, 2019). Kondisi tersebut mendorong pemerintah daerah untuk memperkuat pembangunan infrastruktur sebagai bagian dari strategi peningkatan kapasitas ekonomi wilayah. Dalam kerangka APBD, pembiayaan kegiatan tersebut tercermin pada pos belanja modal (Dwi, 2018).

Belanja Modal adalah pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka pembelian atau pengadaan asset tetap dan aset lainnya yang mempunyai masa manfaat lebih dari dua belas bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan seperti dalam bentuk tanah,peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jaringan,buku perpustakaan dan hewan.(Mody T. Manengkey, Debby Ch. Rotinsulu, 2022)

Berikut dapat kita lihat data Belanja Modal di Provinsi Lampung dalam periode 2014-2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 3. Perkembangan Realisasi Belanja Modal Provinsi Lampung Tahun 2014-2024

Tahun	Belanja Modal
2014	**351,266,016**
2015	**804,089,325**
2016	**1,005,779,805**
2017	**1,400,000,000**
2018	**1,729,327,433**
2019	**1,014,037,524**
2020	**752,528,210**
2021	**849.692.115**
2022	**1.025.325.884**
2023	**1.207.289.357**
2024	**865.795.818**

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung

Pada Tabel 3 di atas menunjukkan bahwa jumlah belanja modal di Provinsi Lampung mengalami fluktuasi (berubah-ubah). Jumlah Belanja Modal tertinggi terjadi pada tahun 2018 yaitu dengan jumlah Rp.1.729.327.433 miliar dan paling terendah pada tahun 2014 yaitu dengan jumlah Rp. 351.266.016 miliar. Terlihat bahwa belanja modal juga cenderung meningkat, meskipun berfluktuasi. Belanja modal tertinggi terjadi pada tahun 2018 sebesar Rp 1.729.327.433 miliar, dan pada tahun tersebut PDRB mencapai Rp.232.165,99 miliar**.** Sebaliknya, pada tahun 2020 belanja modal menurun hingga Rp 752,528,210 juta, dan PDRB pun turun menjadi Rp.240.319,59 miliar**.** Fenomena ini memperkuat teori bahwa belanja modal berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, karena belanja modal berkontribusi besar dalam pembangunan infrastruktur

publik yang berdampak pada peningkatan aktivitas ekonomi daerah. Peningkatan rasio belanja modal diharapkan mampu memberikan pengaruh positif yang lebih besar terhadap kemajuan perekonomian wilayah tersebut. Komponen belanja modal mencakup pengeluaran untuk pengadaan lahan, peralatan dan mesin, pembangunan gedung dan bangunan, infrastruktur seperti jalan, irigasi, serta jaringan, termasuk aset tetap lainnya.

Dalam perspektif ekonomi Islam, pertumbuhan ekonomi tidak hanya dimaknai sebagai peningkatan aspek material, tetapi juga sebagai upaya mewujudkan kesejahteraan manusia secara menyeluruh. Tujuan tersebut bersifat universal tanpa membedakan latar belakang individu, serta menekankan keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan duniawi dan nilai-nilai spiritual (Abidin, 2014). Selain itu, Pendekatan ekonomi Islam menempatkan pemerintah sebagai instrumen yang bertanggung jawab untuk mengatur dan mendistribusikan sumber daya secara adil dan produktif, sehingga pengelolaan keuangan publik seperti Pendapatan Asli Daerah dan belanja modal dipandang sebagai amanah yang harus digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan Masyarakat (Nabilla Az-Zahra et al, 2023). Dalam konteks ini, optimalisasi Pendapatan Asli Daerah melalui alokasi belanja modal yang tepat sasaran diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus memenuhi tujuan keadilan dan kemaslahatan dalam ekonomi Islam (Harris & Khilmia, 2023).

Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surat Q.S. Al-Hasyr ayat 7:

مَآ اَفَاۤءَ اللّٰهُ عَلٰى رَسُوْلِهٖ مِنْ اَهْلِ الْقُرٰى فَلِلّٰهِ وَلِلرَّسُوْلِ وَلِذِى الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ وَابْنِ السَّبِيْلِۙ كَيْ لَا يَكُوْنَ دُوْلَةًۢ بَيْنَ الْاَغْنِيَاۤءِ مِنْكُمْۗ وَمَآ اٰتٰىكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَمَا نَهٰىكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْاۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَۗ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ۘ ﴿٧﴾

"Apa saja (harta yang diperoleh tanpa peperangan) yang dianugerahkan Allah kepada Rasul-Nya dari penduduk beberapa negeri adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak yatim, orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. (Demikian) agar harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu terimalah. Apa yang dilarangnya bagimu tinggalkanlah. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya.". (Q.S .Al-Hasyr:7)

Ayat ini menjelaskan bahwa harta publik termasuk Pendapatan Asli Daerah tidak boleh hanya dinikmati oleh sebagian kelompok saja, tetapi harus dikelola dan dikembalikan kepada masyarakat melalui program pembangunan. Dalam konteks ini, belanja modal menjadi instrumen utama pemerintah untuk mendistribusikan Pendapatan

Asli Daerah melalui pembangunan infrastruktur, fasilitas umum, pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik lainnya. Ketika Pendapatan Asli Daerah dikelola dengan baik dan dialokasikan melalui belanja modal yang tepat sasaran, manfaat pembangunan dapat dirasakan secara merata, produktivitas masyarakat meningkat, dan pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Dengan demikian, pengelolaan Pendapatan Asli Daerah dan belanja modal yang berkeadilan tidak hanya sejalan dengan prinsip ekonomi Islam, tetapi juga menjadi faktor penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Lampung.

Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Lampung menunjukkan tren peningkatan, belanja modal masih mengalami fluktuasi dan pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya stabil. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai seberapa besar pengaruh Pendaatan Asli Daerah dan belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi. Selain itu, jika ditinjau dari perspektif ekonomi Islam, pemerataan kesejahteraan dan kemaslahatan umat menjadi tujuan utama, namun realitasnya masih menunjukkan adanya ketimpangan. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui hubungan antara Pendapatan Asli Daerah dan belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Lampung dalam kerangka ekonomi Islam, guna melihat sejauh mana pengelolaan keuangan daerah telah mencerminkan nilai-nilai keadilan dan kesejahteraan yang diidealkan dalam Islam.

Selain itu, Hasil penelitian terdahulu menunjukkan temuan yang belum konsisten mengenai pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal terhadap pertumbuhan ekonomi. Penelitian yang dilakukan oleh (Tuwo et al, 2022) di Kabupaten Minahasa menemukan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, sementara belanja modal berpengaruh positif namun tidak signifikan. Berbeda dengan itu, penelitian (Lestari et al., 2023) di Kabupaten Langkat menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Sementara itu, penelitian (Angrine et al, 2023) di Sulawesi Utara menemukan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Perbedaan hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal terhadap pertumbuhan ekonomi belum memiliki kesimpulan yang konsisten dan sangat bergantung pada karakteristik daerah dan periode penelitian. Selain itu, sebagian besar penelitian sebelumnya belum mengkaji Provinsi Lampung dengan periode terbaru pasca pandemi COVID-19 serta belum banyak yang

mengaitkannya dengan perspektif ekonomi Islam. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk mengisi celah penelitian tersebut..

Berdasarkan Latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Lampung Dalam Perspektif Ekonomi Islam Tahun 2014-2024". Hal ini disebabkan oleh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal yang belum terserap secara optimal sehingga Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Lampung masih belum optimal.

KAJIAN TEORI

Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan dalam dua sisi, yaitu positif dan negatif. Ketika kegiatan ekonomi mengalami peningkatan pada suatu periode, maka kondisi ekonomi dianggap membaik. Sebaliknya, jika terjadi penurunan, maka hal tersebut mencerminkan kondisi ekonomi yang kurang baik. Secara umum, pertumbuhan ekonomi menggambarkan kemampuan suatu negara dalam meningkatkan penyediaan barang dan jasa bagi masyarakatnya, yang didorong oleh kemajuan teknologi, perkembangan kelembagaan, serta penyesuaian ideologi yang relevan. Pertumbuhan ekonomi mencerminkan kemampuan suatu wilayah dalam meningkatkan kegiatan ekonomi yang berdampak pada bertambahnya pendapatan masyarakat dalam jangka waktu tertentu (Ramla Ilham Darise, 2022). Pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain pendapatan, pengeluaran, dan pembiayaan. Di antara ketiga faktor tersebut, pendapatan memiliki peran yang signifikan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi menggambarkan kecenderungan meningkatnya kapasitas produksi suatu wilayah yang tercermin dari kenaikan output barang dan jasa dalam kurun waktu tertentu.(Prathama Rahardja, 2008)

Teori Robert M. Solow dan T.W.Swan menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh tiga komponen utama yaitu: akumulasi modal, pertumbuhan jumlah tenaga kerja, dan kemajuan teknologi.(Ichwani & Pane, 2024)

Indikator Pertumbuhan Ekonomi

Salah satu alat ukur yang umum digunakan untuk mengidentifikasi pertumbuhan ekonomi di suatu negara atau wilayah adalah Produk Domestik Regional Bruto(PDRB).

Menurut definisi, PDRB adalah jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi di suatu wilayah (regional) tertentu dalam waktu tertentu tanpa melihat faktor kepemilikan. Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah diperoleh dari kenaikan PDRB atas dasar harga konstan yang mencerminkan kenaikan produksi barang dan jasa dari tahun ke tahun.(Fahrudin, 2024)

Pertumbuhan Ekonomi dalam Perspektif Islam

Dalam perspektif ekonomi Islam, pertumbuhan ekonomi merupakan bagian integral dari proses pembangunan ekonomi. Keduanya memiliki keterkaitan yang erat, di mana pembangunan ekonomi tidak hanya mencerminkan peningkatan output, tetapi juga melibatkan perubahan dalam struktur ekonomi dan pola aktivitas masyarakat. Pembangunan ekonomi dalam pandangan Islam turut berupaya mengatasi persoalan-persoalan ekonomi, seperti ketimpangan pendapatan dan dominasi sektor tertentu seperti pertanian. Islam, khususnya dalam teori ekonomi klasik, menaruh perhatian besar terhadap pertumbuhan ekonomi sebagai proses yang berkelanjutan, yang didorong oleh faktor-faktor penting demi tercapainya kesejahteraan manusia secara menyeluruh.(Eza Okhy Awalia Br Nasution et al., 2023)

Firman Allah dalam Q.S Hud ayat 61 yang berbunyi :

وَاِلٰى ثَمُوْدَ اَخَاهُمْ صٰلِحًاۗ قَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗۗ هُوَ اَنْشَاَكُمْ مِّنَ الْاَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيْهَا فَاسْتَغْفِرُوْهُ ثُمَّ تُوْبُوْٓا اِلَيْهِۗ اِنَّ رَبِّيْ قَرِيْبٌ مُّجِيْبٌ ﴿٦١﴾

"Dan kepada Tsamud (kami utus) saudara mereka sholeh. Sholeh berkata : Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada bagimu tuhan selain dia. Dia telah menciptakan kaum dari bumi (tanah) dan menjadikan kaum pemakmurnya, karena itu mohonlah ampun- Nya. Kemudian bertobatlah kepada-Nya, sesungguhnya tuhanku amat dekat (rahmat-Nya) lagi memperkenakan (do'a hamba-Nya)." (Q.S Hud [11] : 61)

Ayat tersebut menjelaskan bahwa manusia memiliki tanggung jawab menjalankan peran sebagai khalifah di bumi melalui aktivitas produktif. Bentuknya dapat berupa bekerja, berusaha, mengelola sumber daya, serta kegiatan ekonomi lainnya sebagai bagian dari ketaatan kepada Allah SWT. Dengan adanya pertumbuhan ekonomi, diharapkan bisa tercipta dan meningkatnya kesejahteraan melalui proses yang selalu mengutamakan dampak *falah* dan *maslahahnya.*

Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah merupakan penerimaan yang bersumber dari potensi ekonomi daerah, seperti pajak dan retribusi, hasil pengelolaan aset yang dipisahkan, serta sumber sah lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Tujuan utama dari Pendapatan Asli Daerah adalah memberikan keleluasaan fiskal bagi pemerintah daerah dalam menggalang pembiayaan secara mandiri untuk menjalankan otonomi daerah, sebagai bentuk penerapan asas desentralisasi (Mahfudh et al., 2022).

Sumber Pendapatan Asli Daerah

1. Pajak Daerah

   Pajak daerah merupakan kewajiban masyarakat untuk menyerahkan sebagian kekayaannya kepada pemerintah daerah, yang timbul akibat adanya kondisi, peristiwa, atau tindakan tertentu yang memberikan status atau kedudukan hukum, namun bukan sebagai bentuk sanksi atau hukuman. Menurut (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, 2009) mengatakan bahwa pajak daerah meliputi: Pajak kendaraan bermotor, Pajak tanah, Pajak hotel, Pajak bahan bakar kendaraan bermotor, dan pajak air penggunaan air.

2. Retribusi Daerah

   Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, retribusi daerah adalah pungutan yang dikenakan oleh pemerintah daerah sebagai balas jasa atas pelayanan atau pemberian izin tertentu yang ditujukan bagi kepentingan orang pribadi atau badan usaha. Retribusi daerah ini dikelompokkan ke dalam tiga jenis golongan : (Asteria, 2015)

   a) Retribusi jasa umum
   b) Retribusi jasa usaha
   c) Retribusi jasa perizinan tertentu

3. Hasil Perusahaan Milik Daerah Dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Yang Dipisahkan

   (Undang-Undang (UU Nomor 33 Tahun 2004, 2004) mengelompokkan jenis pendapatan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan berdasarkan objek pendapatannya, yang meliputi bagian laba dari penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), serta perusahaan milik swasta atau kelompok Masyarakat.

4. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

   (Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, 1999) menjelaskan bahwa Pendapatan Asli Daerah yang sah mencakup berbagai penerimaan daerah di luar pajak dan

pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Sumber ini dapat berasal dari pemanfaatan aset, pendapatan jasa keuangan, selisih nilai tukar, hingga bentuk penerimaan legal lainnya yang timbul dari aktivitas pemerintah daerah.

Pendapatan Asli Daerah dalam Perspektif Islam

Menurut (Nurul Huda, 2017), dalam kerangka ekonomi Islam, negara memegang peran sentral dalam menjamin terpenuhinya kebutuhan sosial masyarakat. Pemerintah bertanggung jawab terhadap penyediaan dan pengelolaan layanan publik agar kemaslahatan umum dapat terwujud. Pendapatan dalam islam terdiri dari endapatan resmi seperti zakat, fay'i, jizyah, kharaj, dan ushr (bea cukai), yang dialokasikan untuk kepentingan publik, termasuk sektor keamanan, infrastruktur, pendidikan, dan pelayanan sosial. Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah harus sesuai dengan prinsip keadilan distribusi, yaitu harta publik tidak boleh hanya beredar pada kelompok tertentu.

Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surat Q.S. An-Nisa' ayat 58:

اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّوا الْاَمٰنٰتِ اِلٰٓى اَهْلِهَاۙ وَاِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ اَنْ تَحْكُمُوْا بِالْعَدْلِۗ اِنَّ اللّٰهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهٖۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ سَمِيْعًاۢ بَصِيْرًا ۝٥٨

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.". (Q.S . An-Nisa':58)

Ayat ini menjelaskan bahwa kewajiban ummat terutama pemerintah untuk melaksanakan amanat yang dibebankan kepadanya baik amanat Allah maupun amanat ummat. Yang dimaksud amanat Allah antara lain melaksanakan perintah-perintah-Nya dan menjauhi larangan-larangan-Nya Sedangkan amanat ummat antara lain: bertanggung jawab, adil dan tidak dhalim. Termasuk terhadap keuangan negara yang dipimpin harus dipergunakan yang sebaik-baiknya untuk mencukupi kebutuhan ummat. Dengan demikian, Dalam perspektif islam PAD harus dikelola secara amanah, adil, dan bertujuan untuk mewujudkan *kemaslahatan* Masyarakat.

Belanja Modal

Belanja modal merupakan jenis pengeluaran pemerintah yang ditujukan untuk pembentukan atau penambahan aset tetap maupun aset lainnya yang memiliki masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Pengeluaran ini mencakup biaya untuk pemeliharaan yang bertujuan mempertahankan atau memperpanjang usia guna aset,

sekaligus meningkatkan kualitas serta kapasitas aset yang dimiliki. (Mahmudi, 2010) Belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian, pengadaan, dan pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 bulan yang digunakan dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, antara lain berupa tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, serta aset tetap lainnya. (Dama et al., 2016)

Jenis-Jenis Belanja Modal

Ada lima jenis belanja modal, antara lain yaitu tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan irigasi dan jaringan, dan juga belanja modal fisik lainnya.(Badrudin, 2017)

1. Belanja Modal Tanah

   Belanja Modal Tanah merupakan pengeluaran pemerintah daerah yang berkaitan dengan perolehan hak atas lahan untuk mendukung kegiatan pembangunan. Proses ini mencakup tahapan administratif hingga lahan tersebut siap dimanfaatkan sebagai aset daerah.

2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

   Belanja Modal Peralatan dan Mesin dialokasikan untuk memperoleh atau meningkatkan kapasitas sarana operasional berupa peralatan dan mesin yang memberikan manfaat jangka panjang bagi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan.

3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

   Belanja Modal Gedung dan Bangunan berkaitan dengan penyediaan fasilitas fisik melalui pembangunan atau pengadaan bangunan beserta tahapan pendukungnya hingga aset tersebut dapat difungsikan.

4. Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

   Belanja modal pada sektor jalan, irigasi, dan jaringan merupakan pengeluaran yang dialokasikan untuk penyediaan, pembangunan, penambahan, penggantian, maupun peningkatan fasilitas tersebut, termasuk biaya perencanaan, pengawasan, dan pengelolaan, agar infrastruktur dapat berfungsi secara optimal.

5. Belanja Modal Fisik Lainnya

   Pengeluaran Modal Fisik Lainnya merupakan pengeluaran yang diperuntukkan bagi penyediaan, pembangunan, penambahan, penggantian, peningkatan, atau pemeliharaan aset fisik yang tidak termasuk dalam kelompok belanja modal tanah, peralatan dan mesin, bangunan dan struktur, serta jalan, irigasi, dan jaringan.

Belanja Modal dalam Perspektif Islam

Sebagai agama yang mengatur seluruh aspek kehidupan, Islam memberikan pedoman bagi setiap aktivitas manusia, termasuk di bidang ekonomi. Penerapan syariat Islam diarahkan pada tercapainya kemaslahatan manusia yang bersifat menyeluruh. Untuk mencapai kesejahteraan tersebut, Untuk mencapai kesejahteraan tersebut, pemerintah menjamin terpenuhinya kepentingan sosial masyarakat dengan menyediakan layanan publik yang adil bagi seluruh rakyatnya, sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah pada Q.S. Al-Anfal ayat 28 berikut:

وَاعْلَمُوْٓا اَنَّمَآ اَمْوَالُكُمْ وَاَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌۙ وَّاَنَّ اللّٰهَ عِنْدَهٗٓ اَجْرٌ عَظِيْمٌ ۝٢٨

"Dan ketahuilah, bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan dan sesungguhnya di sisi Allah-lah pahala yang besar"

Dalam pandangan ekonomi Islam, pengeluaran negara harus disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah dan ditetapkan berdasarkan skala prioritas. Prinsip pengelolaan belanja pemerintah dalam Islam didasarkan pada nilai-nilai syariah yang bersumber dari ajaran pokok agama, yang berfungsi sebagai landasan dalam penentuan arah kebijakan public.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Adapun definisi metode kuantitatif yaitu suatu metode penelitian yang menggunakan data berupa angka (Muhammad, 2022). Pendekatan asosiatif juga digunakan dalam penelitian ini dengan definisi yaitu, Asosiatif adalah suatu rumusan masalah penelitian yang bersifat menanyakan hubungan antara dua variabel atau lebih (Sugiyono, 2017). Penelitian ini dilakukan di Provinsi Lampung dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari publikasi resmi Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung.

Pengumpulan data dilakukan secara dokumentasi dengan mengumpulkanlaporan dan publikasi resmi yang berkaitan dengan pendapatan asli daerah, belanja modal, dan pertumbuhan ekonomi. Data yang telah terkumpul selanjutnya dianalisis dengan regresi linier berganda yang didahului dengan uji asumsi klasik, meliputi uji normalitas, multikolinearitas, autokorelasi dan heteroskedastisitas, guna memastikan kelayakan model penelitian. Pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan bantuan software eviews 12.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Uji Statistik

Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah residual dalam model penelitian berdistribusi normal. Metode statistik yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji Jarque-Bera (JB) melalui histogram normality test. Indikator yang digunakan untuk pengambilan keputusan bahwa data tersebut berdistribusi normal atau tidak adalah apabila nilai probabilitas lebih besar (>) dari tingkat signifikansi α = 5% (0,05), maka data berdistribusi secara normal. Apabila nilai probabilitas lebih kecil (<) dari α = 5% (0,05), maka data tidak berdistribusi normal. Dapat dilihat pada grafik sebagai berikut:

Gambar 1

Hasil Uji Normalitas

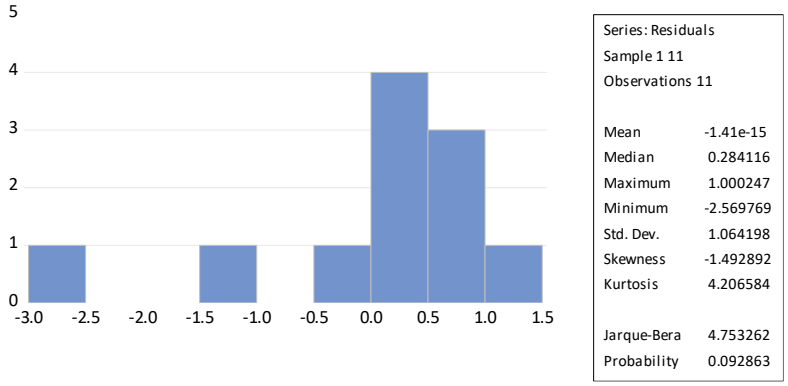

Sumber: Hasil olahan data dengan Program Eviews 12

Berdasarkan tabel di atas , hasil uji normalitas dari olah data *software Eviews 12,* di peroleh hasil bahwa nilai JB (Jarque-Bera) sebersar 4,753 dan nilai *Probability* sebesar 0,092 atau lebih besar dari 0,05 (>5%). Dengan demikian dapat disimpulkan dalam penelitian ini residual terdistribusi dengan normal.

Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah terdapat korelasi yang tinggi atau bahkan sempurna antarvariabel independen dalam model regresi. Metode yang dapat digunakan untuk menguji terjadinya multikolinearitas dapat dilihat dari nilai Tolerance dan Variance Inflation Factor (VIF). Dengan analisis jika nilai tolerance > 0,10 dan VIF < 10 maka dapat diartikan bahwa tidak terdapat multikolinieritas. Apabila nilai tolerance <0,10 dan VIF > 10 maka dapat diartikan bahwa terdapat multikolinieritas pada penelitian tersebut.

Hasil uji Multikolinearitas dilihat dari nilai VIF-nya menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 4
Hasil Uji Multikolinearitas

Variance Inflation Factors
Date: 12/21/25 Time: 15:34
Sample: 1 11
Included observations: 11

Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
C	1.643332	12922.73	NA
LOGX1	0.003748	14016.96	1.112389
LOGX2	0.000921	3089.596	1.112389

Sumber: Hasil olahan data dengan Program Eviews 12

Berdasarkan tabel di atas, hasil uji multikolinearitas menunjukkan bahwa nilai *cetered* VIF untuk variabel X1 (Pendapatan Asli Daerah) Adalah sebesar (1.112389) dan variabel X2 (Belanja Modal) adalah sebesar (1.112389), dalam hal ini seluruh nilai VIF menunjukkan angka < 10. Dengan demikian dapat di simpulkan bahwa dari kedua variabel independen tidak terjadi multikolinearitas.

Uji Autokorelasi

Model regresi dikatakan mengalami autokorelasi jika terdapat hubungan korelasi antara kesalahan pada periode t dengan kesalahan pada periode t-1. Pengujian autokorelasi dapat dilakukan menggunakan uji Durbin-Watson, di mana tidak adanya autokorelasi ditunjukkan apabila nilai Durbin-Watson berada di luar rentang DL/DU dan (4–DL)/(4–DU). Hasil uji Autokorelasi menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 5
Hasil Uji Autokorelasi

Sum squared resid	0.006061	Schwarz criterion	-3.575975
Log likelihood	25.66260	Hannan-Quinn criter.	-3.870845
F-statistic	1.269576	Durbin-Watson stat	1.780560
Prob(F-statistic)	0.377341		

Sumber: Hasil olahan data dengan Program Eviews 12

Berdasarkan tabel uji autokorelasi di atas, diketahui bahwa nilai Durbin–Watson sebesar 1.7805 untuk mengetahui apakah data tersebut mengalami autokorelasi atau tidak, maka bisa dilihat dari perhitungan sebagai berikut :

N = 11
dL = 0.7580
dU = 1.6044
d = 1.7805
4 – dL = 4 – 0.7580 = 3.2420

4 – dU = 4 – 1.6044 = 2.3956
Hasil = dU < d < 4 – dU
1.6044 < 1.7805< 2.3956

Karena nilai Durbin–Watson (1.7805) berada di antara dU (1.6044) dan 4 – dU (2.3956), maka tidak terdapat autokorelasi.

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terjadi perbedaan varians residual antar observasi. Pengujian dilakukan dengan menggunakan metode *white test*. Dengan analisis jika nilai *Prob.Chi-Square*≥0,05(*a*=5%), maka data tidak bersifat heteroskedastisitas. Apabila nilai *Prob.Chi-Square*≤0,05(*a*=5%), maka data bersifat heteroskedastisitas. Hasil uji Heteroskedastisitas menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 6
Hasil Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedasticity Test: White
Null hypothesis: Homoskedasticity

F-statistic	0.406161	Prob. F(4,6)	0.7988
Obs*R-squared	2.343857	Prob. Chi-Square(4)	0.6728
Scaled explained SS	0.871886	Prob. Chi-Square(4)	0.9286

Sumber: Hasil olahan data dengan Program Eviews 12

Berdasarkan tabel di atas, hasil uji heteroskedastisitas menyatakan bahwa nilai *Prob.Chi-Square* yaitu 0.6728 dan 0.9286 lebih dari 0,05 (>5%). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hasil uji data tidak mengandung heteroskedastisitas.

Hasil Uji Hipotesis
Uji Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda adalah salah satu analisis yang digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas (X) yang jumlahnya lebih dari satu terhadap variabel terikat (Y). Penelitian ini menggunakan model ekonomi dengan melakukan regresi variabel yang tersedia melalui metode Ordinary Least Square (OLS). Variabel independen atau variabel X yang mempengaruhi variabel dependen atau variabel Y. Hasil Perhitungan regresi dalam penelitian ini dapat di lihat pada tabel berikut:

Tabel 7
Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Dependent Variable: LOGY
Method: Least Squares
Date: 12/21/25 Time: 15:39
Sample: 1 11
Included observations: 11

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	**3.039455**	1.281925	2.371009	**0.0452**
LOGX1	**0.586924**	0.061223	9.586660	**0.0000**
LOGX2	**0.054518**	0.030351	1.796287	**0.1102**

R-squared	0.936508	Mean dependent var	16.96379
Adjusted R-squared	0.920635	S.D. dependent var	0.132760
S.E. of regression	0.037401	Akaike info criterion	-3.507244
Sum squared resid	0.011191	Schwarz criterion	-3.398727
Log likelihood	22.28984	Hannan-Quinn criter.	-3.575649
F-statistic	59.00003	Durbin-Watson stat	1.516513
Prob(F-statistic)	0.000016		

Sumber: Hasil olahan data dengan Program Eviews 12

Berdasarkan tabel di atas hasil regresi linier berganda yang telah dilakukan, di peroleh sebagai berikut:

$$Y = 3.039455 + 0.586924X^1_t + 0.054518X^2_t + e_t$$

Keterangan :

Y : Pertumbuhan ekonomi

a : Bilangan konstanta

b_1,b_2: Koefisien regresi berganda

X_1 : Pendapatan Asli Daerah

X_2 : Belanja Modal

e : Eror Term

- Koefisien Pendapatan Asli Daerah menunjukkan pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, dengan nilai sebesar 0,586924. Artinya, setiap kenaikan 1% pada Pendapatan Asli Daerah diperkirakan akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,586924 persen.
- Koefisien Belanja Modal berpengaruh positif menunjukkan pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi, meskipun tidak signifikan, dengan nilai sebesar 0,054518. Artinya, setiap kenaikan 1% pada Belanja Modal diperkirakan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,054518 persen.

Hasil Uji t

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah dalam model regresi pada pendapatan asli daerah dan belanja modal berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Apabila nilai Prob lebih kecil dari tingkat kesalahan alpha 0,05 (<0.05%) (yang telah

ditentukan) maka dapat dikatakan bahwa variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat, sedangkan apabila nilai Prob lebih besar dari nilai kesalahan 0,05 (>0,05%) maka dapat dikatakan bahwa variabel bebas tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat. Hasil uji t dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 8
Hasil Uji t

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	3.039455	1.281925	2.371009	0.0452
LOGX1	0.586924	0.061223	9.586660	0.0000
LOGX2	0.054518	0.030351	1.796287	0.1102

Berdasarkan tabel di atas, hasil uji t menunjukkan bahwa nilai prob X^1 (Pendapatan Asli Daerah) sebesar 0.0000 lebih kecil dari 0,05 (0.0000<0,05). Dan $T_{hitung}<T_{tabel}$, Dimana T_{hitung} Adalah sebesar 9.586660 lebih besar dari T_{tabel} sebesar 2,30600. Sehingga dapat di simpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah Berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Lampung.

Variabek X^2 (Belanja Modal) memperoleh nilai prob sebesar 0.1102 lebih besar dari 0,05 (0.1102>0,05). Dan $T_{hitung}<T_{tabel}$ Dimana T_{hitung} Adalah sebesar 1.796287 lebih kecil dari T_{tabel} sebesar 2,30600. Sehingga dapat disimpulkan bahwa belanja modal berpengaruh positif dan tidak signifkan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Lampung.

Hasil Uji F

Uji F digunakan untuk mengevaluasi pengaruh simultan variabel independen terhadap variabel dependen. Pengujian dilakukan dengan membandingkan nilai signifikansi F pada tingkat 5% (0,05). Apabila nilai signifikansi F < 0,05, H_0 ditolak, yang berarti variabel independen secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Sebaliknya, jika nilai signifikansi F > 0,05, H_0 diterima, menunjukkan bahwa variabel independen tidak berpengaruh secara simultan.. Hasil uji f dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 9
Hasil Uji F

F-statistic	59.00003
Prob(F-statistic)	0.000016

Berdasarkan tabel di atas hasil uji F menunjukkan bahwa di peroleh nilai *prob(f-statistic)* sebesar 0.000016 < 0,05, di tunjukkan dengan Fhitung < Ftabel, Dimana Fhitung Adalah sebesar 59.00003 lebih besar dari Ftabel sebesar 4.459. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah dan belanja modal secara simultan berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Lampung.

Koefisien determinan R^2

Uji koefisien determinasi bertujuan untuk menilai besarnya kontribusi variabel independen terhadap variabel dependen. Nilai koefisien determinasi (R^2) berada dalam rentang 0 hingga 1. Semakin mendekati angka 0, semakin rendah pengaruh keseluruhan variabel independen X terhadap variabel dependen Y. sebaliknya, jika koefisien determinasi (R^2) yang diperoleh mendekati angka 1 maka semakin besar pengaruh semua variabel bebas terhadap variabel terikat. Hasil uji Koefisien determinan R^2 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 10
Hasil Uji Koefisien determinan R^2

R-squared	0.936508
Adjusted R-squared	0.920635

Berdasarkan tabel tersebut, nilai R^2 sebesar 0,920635 menunjukkan bahwa 92,06% variasi pertumbuhan ekonomi dapat dijelaskan oleh pendapatan daerah dan belanja modal, sementara 7,94% sisanya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar kedua variabel tersebut.

Pembahasan

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Berdasarkan hasil penelitian pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, hal ini dilihat dari nilai koefisien regresi sebesar 0.586924 dan nilai probabilitas sebesar 0.0000. Hal ini menjelaskan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Lampung. Hasil ini menunjukkan bahwa peningkatan Pendapatan Asli Daerah mencerminkan semakin kuatnya kemandirian fiskal daerah. Pendapatan Asli Daerah yang meningkat memberikan ruang fiskal yang lebih luas bagi pemerintah daerah untuk membiayai pembangunan, terutama melalui belanja modal yang bersifat produktif. Belanja modal yang dialokasikan pada pembangunan infrastruktur, fasilitas publik, serta

sarana pendukung kegiatan ekonomi berperan dalam memperkuat kapasitas produksi daerah dan memperlancar aktivitas ekonomi masyarakat.

Dalam kerangka Teori Pertumbuhan Ekonomi Robert M. Solow dan T.W. Swan menjelaskan hubungan antara Pendapatan Asli Daerah dan pertumbuhan ekonomi dengan menggunakan tiga faktor utama, yaitu pengumpulan modal, peningkatan jumlah pekerja, serta kemajuan dalam teknologi. Peningkatan pendapatan daerah memberi kesempatan lebih besar bagi pemerintah setempat untuk meningkatkan investasi publik dengan cara membelanjakan untuk infrastruktur, sehingga jumlah aset fisik daerah bertambah dan kemampuan produksi daerah semakin meningkat. Infrastruktur yang cukup, seperti jalan raya, sekolah, dan rumah sakit, membuat pekerjaan lebih efisien dan meningkatkan kualitas tenaga kerja. Selain itu, pembangunan sarana pendukung seperti infrastruktur teknologi informasi, sarana pendidikan, serta dukungan terhadap inovasi lokal menciptakan kesempatan untuk penggunaan teknologi yang lebih baik dalam proses produksi. Dalam jangka panjang, kemajuan teknologi menjadi faktor utama yang mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, sesuai dengan yang ditekankan dalam teori Robert M. Solow dan T.W.Swan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu (Arbila, 2022) yang menyatakan bahwa pendapatan asli daerah memiliki dampak yang baik dan berarti terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten labuhan ratu. Hal ini menunjukkan bahwa kenaikan pendapatan asli daerah memiliki pengaruh yang besar, sehingga mampu memperkuat kemampuan keuangan pemerintah daerah untuk mendanai proyek pembangunan yang menghasilkan nilai tambah, serta mendorong kegiatan ekonomi masyarakat secara lebih luas. Dengan demikian, Pendapatan Asli Daerah memiliki peran penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dengan memperkuat kemandirian keuangan dan memfasilitasi pembiayaan pembangunan yang lebih efektif serta berkelanjutan.

Pengaruh Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Berdasarkan hasil penelitian Belanja Modal berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini dilihat dari koefisien regresi sebesar 0.054518 dengan nilai probabilitas sebesar 0.1102. Hal ini menjelaskan bahwa Belanja Modal berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di provinsi lampung. Hasil ini menunjukkan bahwa peningkatan belanja modal yang dilakukan pemerintah daerah belum mampu memberikan dampak langsung terhadap

pertumbuhan ekonomi dalam periode penelitian. Kondisi tersebut tidak menunjukkan bahwa belanja modal tidak penting, melainkan mencerminkan adanya keterlambatan dampak antara realisasi belanja dan manfaat ekonomi yang dihasilkan. Belanja modal, khususnya untuk pembangunan infrastruktur dan pengadaan aset daerah, memerlukan waktu yang relatif panjang mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga benar-benar dimanfaatkan oleh masyarakat, sehingga dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi belum dapat dirasakan dalam jangka pendek.

Dalam kerangka Teori Pertumbuhan Ekonomi Robert M. Solow dan T.W.Swan, belanja modal merupakan bagian dari proses akumulasi modal fisik, namun akumulasi modal saja tidak cukup untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan. Dampak belanja modal akan lebih optimal apabila didukung oleh peningkatan kualitas tenaga kerja dan kemajuan teknologi. Ketidaksignifikanan belanja modal dalam penelitian ini juga dapat disebabkan oleh ketidaktepatan alokasi, fluktuasi realisasi anggaran, serta pembangunan yang belum sepenuhnya produktif dalam mendukung aktivitas ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, belanja modal perlu diarahkan secara lebih efektif dan terintegrasi dengan kebijakan pengembangan sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi agar kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi daerah menjadi lebih nyata.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Romi Daniel Tuwo, Debby Christina Rotinsulu, 2022) yang menemukan bahwa belanja modal memiliki hubungan positif tetapi tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan belanja modal belum mampu memberikan dampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi, karena manfaat belanja modal bersifat jangka panjang. Belanja modal yang dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur, sarana publik, dan fasilitas pendukung membutuhkan waktu sebelum dapat meningkatkan produktivitas dan aktivitas ekonomi masyarakat. Selain itu, ketidaktepatan sasaran pembangunan serta fluktuasi realisasi belanja modal menyebabkan dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi belum optimal.

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Hal ini dilihat dari Uji simultan (Uji f) di peroleh nilai *prob(fstatistic)* sebesar

0.000016 < 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Lampung.

Nilai koefisien determinasi (R-square) sebesar 92,06% menunjukkan bahwa variasi pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung sebagian besar dapat dijelaskan oleh variabel Pendapatan Asli Daerah dan belanja modal dalam model penelitian ini. Artinya, Pendapatan Asli Daerah dan belanja modal memiliki peran yang sangat dominan dalam menjelaskan dinamika pertumbuhan ekonomi daerah. Sementara itu, sisanya sebesar 7,94% dipengaruhi oleh faktor lain di luar model, seperti kualitas sumber daya manusia, investasi swasta, stabilitas ekonomi, serta perkembangan teknologi. Temuan ini mengindikasikan bahwa kebijakan fiskal daerah, khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan pendapatan asli daerah dan belanja modal, merupakan faktor penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di Provinsi Lampung.

Dari segi ekonomi, pengaruh yang signifikan dari pendapatan asli daerah dan belanja modal menunjukkan hubungan yang erat antara kemandirian keuangan daerah dan pertumbuhan ekonomi. Peningkatan pendapatan daerah memberi kesempatan lebih besar bagi pemerintah daerah untuk mendanai pembangunan sendiri dan menentukan penggunaan anggaran ke sektor-sektor yang menghasilkan nilai lebih. Pembelian modal, meskipun secara sebagian belum terlihat dampaknya yang besar, tetap membantu dalam membangun infrastruktur dan fasilitas umum yang mendukung berbagai kegiatan ekonomi masyarakat. Ketika pendapatan asli daerah meningkat dan pengelolaan belanja modal dilakukan dengan baik, kedua hal tersebut saling mendukung dan memperkuat pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi. Dalam kerangka Teori Pertumbuhan Ekonomi Robert M. Solow dan T.W.Swan menunjukkan bahwa kondisi ini menunjukkan proses penambahan modal yang didorong oleh peningkatan kemampuan kerja tenaga kerja dan pemanfaatan teknologi, sehingga bisa mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara lebih terus menerus.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian (Arbila, 2022) yang menjelaskan bahwa pendapatan asli daerah dan belanja modal berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah memberikan sumber pembiayaan yang relatif fleksibel bagi pemerintah daerah, sementara belanja modal berperan dalam menciptakan infrastruktur dan fasilitas publik yang meningkatkan produktivitas serta efisiensi kegiatan ekonomi. Ketika Pendapatan Asli Daerah dikelola

secara efektif dan dialokasikan melalui belanja modal yang tepat sasaran, dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi menjadi lebih nyata dan terukur.

Perspektif Ekonomi Islam Memandang Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Dari sudut pandang ekonomi Islam, pertumbuhan ekonomi tidak hanya dilihat sebagai naiknya produksi atau pendapatan daerah, tetapi juga sebagai cara meningkatkan kesejahteraan warga yang adil dan bisa terus berkelanjutan. Pertumbuhan ekonomi yang baik membutuhkan pengelolaan uang pemerintah yang bisa membagi manfaat pembangunan secara adil dan mendorong partisipasi ekonomi masyarakat secara luas. Oleh karena itu, instrumen fiskal daerah seperti Pendapatan Asli Daerah dan belanja modal memainkan peran penting dalam membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Pendapatan Asli Daerah dalam ekonomi Islam dipandang sebagai amanah publik yang bersumber dari aktivitas ekonomi masyarakat dan harus dikelola secara transparan serta bertanggung jawab. Peningkatan pendapatan asli daerah mencerminkan meningkatnya aktivitas ekonomi daerah dan memperkuat kapasitas fiskal pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan. Ketika pendapatan asli daerah dialokasikan secara efektif pada sektor-sektor produktif, pertumbuhan ekonomi dapat terdorong melalui peningkatan pelayanan publik, penciptaan iklim usaha yang kondusif, serta peningkatan output daerah secara berkelanjutan.

Pada masa Rasulullah SAW, sumber-sumber pendapatan negara berasal dari zakat, kharaj, jizyah, fai', dan ghanimah yang dikelola untuk kepentingan masyarakat. Pendapatan tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, membiayai pembangunan sarana umum, serta menjaga stabilitas ekonomi umat (Aisy & Aziz, 2024). Prinsip pengelolaan ini relevan dengan fungsi belanja modal saat ini, yaitu sebagai instrumen investasi publik untuk penyediaan infrastruktur dan fasilitas umum yang mendukung produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Namun, karena belanja modal bersifat jangka panjang, dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi tidak selalu dapat dirasakan secara langsung dalam periode tertentu.

Secara keseluruhan, perspektif ekonomi Islam memandang bahwa pertumbuhan ekonomi yang dipengaruhi oleh pendapatan asli daearah dan belanja modal sangat bergantung pada kualitas pengelolaannya. Ketika pendapatan asli daerah dikelola sebagai amanah dan belanja modal dialokasikan secara tepat sasaran, pertumbuhan ekonomi yang tercipta tidak hanya meningkatkan output daerah, tetapi juga mendorong pemerataan

kesejahteraan dan keberlanjutan pembangunan. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi dalam Islam tidak hanya berorientasi pada pencapaian ekonomi semata, tetapi juga pada kemaslahatan sosial dan keseimbangan pembangunan.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, penelitian ini menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah memiliki dampak positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Lampung. Ini menunjukkan bahwa kenaikan Pendapatan Asli Daerah dapat memperkuat kemampuan keuangan pemerintah daerah dalam mendanai pembangunan dan mendorong kegiatan ekonomi lokal secara nyata. Sementara itu, belanja modal memiliki pengaruh positif tetapi tidak terlalu besar terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Lampung. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan belanja modal belum sepenuhnya terasa secara langsung pada pertumbuhan ekonomi karena manfaatnya baru bisa terlihat dalam jangka menengah hingga jangka panjang.

Secara bersamaan, Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal mempunyai dampak besar terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Lampung. Ini menunjukkan bahwa kerja sama antara kemampuan daerah dalam mengumpulkan pendapatan sendiri dan penggunaan dana pembangunan yang tepat menjadi hal penting dalam mendorong peningkatan hasil produksi dan pertumbuhan ekonomi daerah. Dalam pandangan Ekonomi Islam, hubungan Pendapatan Asli Daerah dan belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi melalui penekanan pada fungsi amanah dan kemaslahatan dalam pengelolaan keuangan publik. Pendapatan Asli Daerah yang dihimpun dari aktivitas ekonomi masyarakat dipandang sebagai sarana memperkuat kapasitas fiskal daerah yang harus dikelola secara adil, transparan, dan bertanggung jawab agar manfaatnya kembali kepada masyarakat dalam bentuk pelayanan publik dan dukungan terhadap sektor produktif. Sementara itu, belanja modal diarahkan sebagai investasi publik jangka panjang yang menyediakan infrastruktur dan fasilitas umum guna meningkatkan produktivitas serta memperluas kesempatan ekonomi. Kombinasi pengelolaan Pendapatan Asli Daerah yang efektif dan alokasi belanja modal yang tepat sasaran mendorong aktivitas ekonomi yang lebih luas, menciptakan distribusi manfaat pembangunan yang lebih merata, serta menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang tidak hanya tinggi secara angka, tetapi juga berkeadilan dan berkelanjutan sesuai dengan tujuan ekonomi Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Abidin, Z. (2014). MENEROPONG KONSEP PERTUMBUHAN EKONOMI (Telaah atas Kontribusi Sistem Ekonomi Islam atas Sistem Ekonomi Konvensional). *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, *7*(2), 356–367. https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v7i2.334

Aisy, N. R., & Aziz, J. A. (2024). Stabilisasi Ekonomi Masa Nabi Muhammad Saw (Strategi Pengembangan Jizyah Dan 'Usyr melalui Kebijakan Fiskal). *Journal Of Social Science Research*, *4*(2), 4272–4282. https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/download/8378/5690

Angrine Laodini, Ita Pingkan F. Rorong, S. Y. . T. (2023). *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*. *23*(2), 217–228.

Arbila, N. (2022). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Dairi. *Accounting Progress*, *1*(2), 1–6. https://doi.org/10.70021/ap.v1i2.56

Asteria, B. (2015). Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Di Jawa Tengah. *Jurnal Riset Manajemen*, *02*.

Badan Pusat Statistik Keuangann Provisi Lampung (2024).

Badrudin, R. (2017). *Ekonomika otonomi daerah*.

Dama, T. S., David, P., Saerang, E., & Elim, I. (2016). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal Di Kota Bitung 2003-2013. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, *16*(3), 394–406.

Dwi, S. (2018). /KOTA SUMDwi, S. (2018). PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, BELANJA MODAL TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DAN DANA PERIMBANGAN SEBAGAI PEMODERASI DI KABUPATEN/KOTA SUMATERA UTARA. Jurnal Akuntansi Bisnis & Publik, 8(ISSN: 2087-4669), 54–68.ATERA UTARAPENGARUH . *Jurnal Akuntansi Bisnis & Publik*, *8*(ISSN: 2087-4669), 54–68.

Eza Okhy Awalia Br Nasution, Listika Putri Lestari Nasution, & Minda Agustina. (2023). 63-71+Pertumbuhan+Ekonomi+Dalam+Perspektif+Islam. *Journal of Management and Creative Business (JMCBUS)*, *1*(1), 66.

Fahrudin. (2024). Interdisciplinary Explorations in Research. *Interdisciplinary Explorations in Research Journal (IERJ)*, *2*, 234–251.

Fani Wiraswasta, M. Pudjihardjo, P. M. A. (2019). Pengaruh Dana Perimbangan Dan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Melalui Belanja Modal Di Kota Dalam Wilayah Jawa Timur (Tahun 2009-2014). *Jurnal Bisnis Dan Manajemen*, *5*(2). https://doi.org/10.26905/jbm.v5i2.2390

Harris, J. I., & Khilmia, A. (2023). The Role of the State in the Economy: Exploring Fiscal and Monetary Policies in Government (Theoretical Review in Islamic Economics). *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah I*, *8*(30), 684–695. https://doi.org/10.30651/jms.v8i3.19013

Humaira, S., & Widyawati, D. (2025). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Pertumbuhan Ekonomi, dan Jumlah Penduduk Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan

Daerah. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, *14*(3), 1–18.

Ichwani, B. K. S. M. B. D. U. A. T., & Pane, S. G. (2024). Pengaruh Model-Solow Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. : *: Journal of Management Accounting, Tax and Production*, *2*(2), 709–816. https://rayyanjurnal.com/index.php/mantap/article/download/3331/pdf?__cf_chl_tk=KdAlDgtNF.vaEDJlw6XGNyBNOONAz2zsAIaT0z6YluI-1768276617-1.0.1.1-ayjpTFoSCGbng5X7P_TW0aankjAGJZunUzzo8niWX6k

Kartini Katrina Mamuka, Ita Pingkan F. Rorong, J. I. S. (2019). *Pertumbuhan ekonomi*. *19*(03), 118–128. https://id.wikipedia.org/wiki/Pertumbuhan_ekonomi

Lestari, R. Y., Ridwan, M., & Batubara, M. (2023). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pertumbuhan Ekonomi Dalam Perspektif Ekonomi Islam di Kabupaten Langkat. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, *9*(2), 2815. https://doi.org/10.29040/jiei.v9i2.9681

Mahfudh, Saleh, H., & Saleh, M. Y. (2022). *Analisis Peningkatan Pendapatan Asli Daerah* (M. Ruslan & S. Suriani (eds.)). Pusaka Almaida.

Mahmudi. (2010). *Analisis laporan keuangan pemerintah daerah : panduan bagi eksekutif, DPRD, dan masyarakat dalam pengambilan keputusan ekonomi, sosial dan politik*. https://library.bpk.go.id/koleksi/detil/jkpkbpkpp-p-9073

Mody T. Manengkey, Debby Ch. Rotinsulu, I. P. F. R. (2022). *Muslim Jafar 1 , Devy Aisyah 2 , Amrina 3*. *2338*(September), 13–34.

Muhammad, D. (2022). *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam:Pendekatan Kuantitatif*.

Nabilla Az-Zahra, Maylaffayza Permata Shifa2, Fadlan Desfiansyah, F. Z. (2023). Peran Kepemimpinan Transformasional terhadap Kinerja Individu Amil Pada Lembaga Amil Zakat Infaq dan Sodaqoh (LAZIS) Di Surakarta. *Al-Urban: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Filantropfi Islam*, *7*(2), 153–166. https://doi.org/10.22236/alurban

Noviasari, S. A., & Alich. (2021). Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pdrb Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009–2012. *Repository UB*.

Nurul Huda, D. (2017). *Keuangan Publik Islam: Pendekatan Teortis dan Sejarah*.

Prathama Rahardja, M. M. (2008). *Teori ekonomi makro : suatu pengantar*. Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

Ramla Ilham Darise. (2022). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sulawesi Tengah Periode 2015-2019. *Jurnal Multidisiplin Madani*, *2*(5), 2293–2310. https://doi.org/10.55927/mudima.v2i5.330

Rohyana, C., & Abdul Rozak, R. (2022). Pengaruh Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Dan Pertumbuhan Belanja Modal Terhadap Kineja Keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung. *Land Journal*, *3*(2), 60–71. https://doi.org/10.47491/landjournal.v3i2.2308

Romi Daniel Tuwo, Debby Christina Rotinsulu, G. M. . K. (2022). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal Terhadap*. *21*(04), 79–90.

Sugiyono. (2017). *Statistika untuk penelitian*. Albeta.

Undang-Undang (UU) Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah, Pub. L. No. 33 (2004). https://peraturan.bpk.go.id/Details/40770/uu-no-33-tahun-2004

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah, Pub. L. No. 22 (1999). file:///C:/Users/alico/Downloads/UU Nomor 22 Tahun 1999.pdf

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, Pub. L. No. 28 (2009). file:///C:/Users/alico/Downloads/UU Nomor 28 Tahun 2009.pdf